

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Oleh:

Duma Rahel Situmorang

Universitas Methodist Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yang dianggakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Contoh suatu pertanyaan/ Pernyataan yang memerlukan alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, sangat tidak setuju dimana masing-masing pilihan jawaban diberi skor. Penelitian ini dilakukan di Desa se-Kecamatan Pangururan. Waktu penelitian dimulai dari proses penentuan judul penelitian hingga sampai selesai penelitian dilakukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih kriteria responden adalah aparatur dan pejabat tim pengelola Dana Desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab dan bendahara sebagai pemegang kas dan 1 orang dari masyarakat yang ikut dalam MusDes (Musyawarah Desa). Maka dalam setiap desa akan diambil 3 responden. Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Transparansi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 tahun 2014 tentang

Dana Desa yang diterima dari Dana APBN dan langsung diterima oleh desa.

Desa juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tentang alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya di desanya.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.37 tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18). Transparan adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi sebenar- benarnya dan seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dana Desa yang digelotorkan untuk 25 Desa di Kecamatan Pangururan cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Maka peneliti meninjau dan melihat langsung tentang pengelolaan Dana Desa yang dikelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena pengelolaan Dana Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut dan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat di desa yang tidak mengetahui bagaimana perencanaan dan pengelolaan Dana Desadidesanya, berdasarkan atikel dan beberapa sumber yaitu: Detiknews (15 Oktober 2018) kasus korupsi kas desa sebesar 25 juta oleh kades sidoarjo diserahkan ke kejaksaan, detiknews (22 Januari 2018) korupsi Dana Desa sebesar 690 juta oleh kades kepuhanyar, merdeka.com di Sumut kejaksaan negeri Deli Serdang menahan kepala desa percut kecamatan percut sei tuan atas dugaan kasus korupsi penyimpangan penyaluran Dana Desa sebesar 782 juta pada anggaran 2016 menyatakan bahwa masih banyak disajikan data-data keuangan di desa yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa diseluruh Indonesia, di Sumut dan Samosir. Dan juga dilihat dari penelitian peneliti terdahulu yang dilakukan diberbagai

daerah/desa di Indonesia juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Oleh Ardi Maranata(2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Berdasarkan Pasal 9 Thn 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (di desa Simpang kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak) bahwa pengelolaan dan pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa di desa simpang kasturi kecamatan mandor belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh Azwardi Sukanto (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Efektifitas ADD (Alokasi Dana Desa) dan kemiskinan di provinsi Sumsel bahwa penyaluran dana ADD (Alokasi Dana Desa) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh Nurharibu Wibisono dan Herry Purnomo (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mengungkapkan

fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa dikabupaten madiun hasil penelitiannya menemukan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu tidak berfungsi peran pendamping desa lemahnya pembinaan dan penawasan camat dan lemahnya pengawasan BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa dan kurang cakupnya sumber daya manusia (SDM) pengelolaan Dana Desa dan Kepala Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan karena masih banyak penelitian terdahulu yang meneliti pengelolaan Dana Desa yang belum berjalan baik, baik secara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam pengalokasian Dana Desa didesa yang erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Maka dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi di desa dikecamatan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas,

Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang penulis identifikasi adalah:

1. Masih adanya kegiatan belanja aparatur dan opsional pemerintah desa di desa belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan Berdasarkan Pasal 9 Thn 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
2. Masih ada penyaluran Dana ADD (Alokasi Dana Desa) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Masih lemahnya pengawasan camat, peran pendamping desa dan BPD (Badan Permusyawahan Desa) dan lemahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa didesanya.
4. Dari penelitian terdahulu masih ada pengelolaan Dana Desa yang masih belum terlaksana sesuai dengan

peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
4. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Tabel 2. 1
Organilitas Penelitian

Uraiah	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
	Rizky Amalia Sugista(2017)dan Riswantini (2018)	
Variabel Dependen	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keuangan Desa	Pengelolaan Dana Desa
Variabel Indenden	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas, Transpara nsi dan Partisipasi
Tahun Penelitian	2018 dan 2017	2019
Populasi Penelitian	Desa Talaga Kecamatan Carigin Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lampung	Desa di Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir

Sumber: dari berbagai sumber

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Anggraeni dan Hadiprajitno, 2013). Dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agen*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada *agen* untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan *agen*, sedangkan pihak yang melakukan transaksi

dengan *agen* disebut dengan *third party* (Budi, 2015:5-6).

Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai *agen* yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai *agen* harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipalnya.

Good Governance

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasno,2009:18).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi,2015:9).

Transparansi

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka,mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015:224).

Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo,2009: 18).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4. Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah.

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis, Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif (Simanjuntak et al., 2020) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2021). Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Situmorang & Simanjuntak, 2019) dan (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Data yang digunakan adalah Kuesioner yang disebar ke perangkat desa di desa kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 desa di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan Seluruh populasi akan diteliti dengan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dan menggunakan software statistik SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner penelitian dan dikatakan data valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Skor variabel yang mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05.

Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara *One Shot*, hasil jawaban dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan analisis grafik untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk menemukan ada

tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016; 134) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau : $H_0 : \beta_i = 0$

Tabel 4. 1 Hasil Uji-t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.148	.530		5.937	.000
AKUNTABILITAS	.026	.090	.037	.290	.773
TRANSPARANSI	-.041	.101	-.052	-.407	.685
PARTISIPASI	.298	.089	.370	3.329	.001

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN DANA DESA

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Dalam penelitian ini uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:96).

Tabel 4. 2Uji-F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.092	3	.697	3.967	.011 ^b
	Residual	12.482	71	.176		
	Total	14.574	74			

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN DANA DESA

b. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2019 |

Uji Analisis Koefisien Determinasi (R 2)

Nilai koefisien determinasi (R 2) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas. Pada Tabel 4.19 berikut ini adalah hasil uji determinasi.

Tabel 4. 19 Hasil Determinasi (R 2)

Tabel 4. 22 Koefisien Determinasi (R 2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.379 ^b	.144	.107	.41929

a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
 b. Dependent Variable: PENGELOLAAN DANA DESA
 Sumber : Hasil olahan SPSS, 2019

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t-hitung akuntabilitas sebesar 0,290 lebih kecil dengan nilai t-tabel sebesar 1,993. Lebih kecilnya t-hitung daripada t-tabel maka ini digambarkan dengan menolak H₁. Pada penelitian ini juga memiliki nilai signifikan t sebesar 0,773 lebih besar dari alpha 0,05. Dengan melihat lebih besarnya sig. t daripada alpha maka ini digambarkan dengan menolaknya H₁

Pengaruh Transparansi Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t-hitung transparansi sebesar -0,407 lebih kecil dengan nilai t-tabel sebesar 1,993. Lebih kecilnya t-hitung daripada t-tabel maka ini digambarkan dengan menolak H_2 . Pada penelitian ini juga memiliki nilai signifikan t sebesar 0,685 lebih besar dari alpha 0,05. Dengan melihat lebih besarnya sig. t daripada alpha maka ini digambarkan dengan menolak H_2 .

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t-hitung partisipasi masyarakat sebesar 3,329 lebih besar dengan nilai t-tabel sebesar 1,993. Lebih besarnya t-hitung daripada t-tabel

maka ini digambarkan dengan diterimanya H_3 . Pada penelitian ini juga memiliki nilai signifikan t sebesar 0,001 lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan melihat lebih kecilnya sig. t daripada alpha maka ini digambarkan dengan diterimanya H_3 .

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Secara Simultan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini dilihat melalui dapat nilai F-hitung sebesar 3,967. Dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari sig. a sebesar 0,05. Dengan melihat lebih kecilnya sig. F daripada alpha maka ini digambarkan dengan diterimanya H_4 .

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada

desa Di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya : 1) Variabel akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Kesimpulan ini menolak hipotesis, yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sebelum peneliti membagi kuisioner yang terdiri dari beberapa pernyataan dan peneliti sudah berusaha menjelaskan kepada responden untuk menjawab dengan jujur dan apa adanya. Namun setelah peneliti mendapatkan data dan setelah disimpulkan oleh peneliti, akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa. 2) Variabel transparansi berpengaruh Negatif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini dibuktikan melalui uji t yang dilihat melalui nilai t-hitung transparansi lebih kecil dengan nilai t-tabel dan memiliki signifikan t lebih besar dari alpha 0,05. Kesimpulan ini menolak hipotesis, yang menyatakan

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sebelum peneliti membagi kuisioner yang terdiri dari beberapa pernyataan dan peneliti sudah berusaha menjelaskan kepada responden untuk menjawab dengan jujur dan apa adanya. Namun, setelah peneliti mendapatkan data dan setelah disimpulkan oleh peneliti, akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa. 3) Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini dibuktikan melalui uji t yang dilihat melalui nilai t-hitung partisipasi masyarakat lebih besar dengan nilai t-tabel dan memiliki signifikan t lebih kecil dari alpha 0,05. 4) Variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Pangururan. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang dilihat melalui nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0.05

Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian, yaitu:

1. Sampel pada responden penelitian ini digunakan sebanyak 3 (tiga) responden
2. Partisipasi yang maksud dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang mengikuti Musyawarah Desa (MusDes).
3. Penelitian ini dilakukan di Desa se-Kecamatan Pangururan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel yang akan diteliti untuk lebih menjawab permasalahan.
2. Partisipasi masyarakat yang ikut dalam proses penganggaran alokasi Dana Desa dan masyarakat yang mengikuti MusDes selama 3 Tahun Berturut-turut.
3. Penelitian untuk peneliti selanjutnya dilakukan pada desa se-kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dzauqy Abdur Rabb. 2016. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasrakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*. Vol.11 No 1 Juli 2016.
- Aji Permana, Bayu. 2012. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasrakan Metode CAMELS dan Metode RGEC*. Universitas Negeri Surabaya.
- Arif Widyatama, Lola Novinta Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*.
- Astri Juainita Makalag, Grace B. Nanggai & Herman Karamoy. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*.
- Azwardi Sukanto. 2014. *Efektifitas ADD (Alokasi Dana Desa) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*.

- Budi Santoso. 2015. *Prinsi-Prinsip Dasar,Teori,dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor: Ghalia.
- Daud Suhario Lumban Tobing. 2014. *Analisis ADD (Alokasi Dana Desa) Berdasarkan Karateristik Desa di Kabupaten Dairi*.
- Fecky M Panggemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka. 2018. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDESA Talawaan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara*.
- Fitri Sukmawati. 2019. *“Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kabupaten Garut”*.
- Gayatri,Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Justita Dura. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesjahteraan Masyarakat*.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling.1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.1976.
- Mahmudi. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Misnawati, Andi Astinah Adnan, Agustinus. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*.
- Moh. Ubaidillah, Dian Arumsari. 2018. *Pengaruh Tata Kelola dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.

- Riswantini. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Risya Umami, Idang Nurodini. 2017. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rizky Amalia Sugista. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa*.
- Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). *Jurnal manajemen*. 6(2), 129–138.
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.29>
- 85
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.269>
- 4
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL*

- AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 100–108.
<https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.431>
- 2
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (konsep, Aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Undang-Undang dan Peraturan: Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) sembilan aspek fundamental perwujudan *Good Governance*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. 2015. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 7 Huruf b.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000. *Good Governance*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 49 PMK 07 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.* 2015. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. 2014. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- PP RI Nomor 29 tahun 2014 pasal 1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang kecamatan.
- PER BUP No. 22 Tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada camat pada pasal 3.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1).
- Website: *DetikNews.Merdeka.com*
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/2Q462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangan-desa>.
<http://www.djpk.depkeu.go.id>
<http://pmd.kemendagri.go.id>.